

ADOPSI INOVASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI KPU DIY DALAM MENYAMPAIKAN PESAN KEPADA MASYARAKAT

Anbiya Zaneti Dhimas A, Monika Pretty Aprilia
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Amikom Yogyakarta
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Amikom Yogyakarta

korespondensi: anbiya.0750@students.amikom.ac.id

ABSTRACT

The development of information and communication technology (ICT) in the era of globalization is increasingly advanced and its development is growing rapidly. Indonesia as a democratic country, it is appropriate to use ICT for various needs in the government sector. One of them is innovation in the use of new media, which is expected to be a transformation step from conventional media to digital. This study aims to see how the process of adopting innovations in the use of communication technology carried out by the DIY KPU, as well as the obstacles they face in conveying messages to the public. This study uses a qualitative approach and case study methods. The theory used is the theory of innovation adoption proposed by Everett Rogers. There were three people who became informants in this study, namely the Head of the Division of Socialization of Voter Education for Community Participation and Human Resources of the DIY KPU, then the Secretary of the DIY KPU and one staff of the Technical and Community Participation Relations section. Research findings show that in realizing innovation there are new prospects for the development of communication. The results of interviews with informants also show that there are several obstacles in terms of human resources, facilities and infrastructure, digital media infrastructure, and budgets in the use of ICT in KPU DIY.

Keywords: Information and communication technology, KPU DIY, innovation adoption, social media

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era globalisasi sudah semakin maju dan perkembangannya semakin pesat. Indonesia sebagai negara demokrasi, sudah selayaknya menggunakan TIK untuk berbagai kebutuhan di sektor pemerintahan. Salah satunya adalah inovasi penggunaan media baru, yang diharapkan menjadi langkah transformasi dari media konvensional menuju digital. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses adopsi inovasi penggunaan teknologi komunikasi yang dilakukan oleh KPU DIY, serta hambatan yang mereka hadapi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori adopsi inovasi yang dikemukakan oleh Everett Rogers. Ada tiga orang yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, kemudian Sekretaris KPU DIY serta satu orang staff bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam mewujudkan inovasi ada prospek baru bagi perkembangan komunikasi. Hasil dari wawancara dengan informan juga menunjukkan ada beberapa kendala dalam segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, infrastruktur media digital, serta anggaran dalam penggunaan TIK di KPU DIY.

Kata Kunci: Teknologi informasi dan komunikasi, KPU DIY, adopsi inovasi, media sosial

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah memberikan sumber (resources) informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia. Meskipun peranan informasi dalam

beberapa dekade kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan manusia.¹ Semua fungsi

komunikasi dapat terhubung melalui TIK khususnya media digital dari mulai fungsi sebagai kebutuhan dan memberikan informasi, edukasi, sosialisasi, hiburan sampai mempengaruhi dan membuat opini. Sehingga perkembangan TIK ini menjadi tuntutan dan tantangan bagi lembaga pemerintahan untuk dapat beradaptasi di setiap perkembangannya yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bentuk pelayanan, kebutuhan masyarakat secara luas demi kesejahteraan yang merata dan terwujudnya keadilan.

Semua rencana kebijakan untuk e-government telah fokus pada isu-isu operasional internal, pemberian layanan jasa pemerintah dan teknologi itu sendiri yang secara masif dipercayakan pada TIK sebagai instrumen untuk menjadikan pemerintah lebih efektif, lebih bersahabat dan mudah dihubungi bagi masyarakat yang harus dilayani. Instansi pemerintah semakin merangkul TIK untuk meningkatkan efisiensi dan mengintegrasikan karyawan, mitra dan warga negara secara mulus.²

Teknologi informasi dan komunikasi peranannya sangat signifikan dalam perkembangan zaman sudah banyak masyarakat menikmati dan memanfaatkan kemajuan teknologi, bahkan perannya di sektor pemerintahan sangat membantu untuk berjalannya sebuah demokrasi. Penggunaan media sangat penting bagi instansi pemerintah agar mudah menghadapi perkembangan

digitalisasi demi keberhasilan proses penyampaian informasi.

Menurut Deakin (2012 *dalam* Sahban, 2018)³ mengingat pentingnya teknologi informasi dewasa ini, perkembangannya sudah masuk dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam pertukaran informasi suatu organisasi atau instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Tentu dari penggunaan TIK akan membawa kemanfaatan yang lebih dari sebelum menggunakannya, pergantian dari konvensional dan sekarang menjadi digital alasan itu tidak lain melainkan demi memudahkan terlaksananya pemilu dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Persebaran informasi saat ini sangat cepat dan mudah dilakukan. Dengan adanya platform media sosial yang mana itu adalah bentuk dari perkembangan teknologi digital, pola komunikasi menjadi sangat mudah dan terbuka, karena pola yang ditawarkan dalam media sosial cenderung lebih terbuka untuk umum. Salah satu media sosial yang sering digunakan oleh instansi pemerintah adalah Website, Facebook, Twitter, Youtube dan Instagram. Dengan banyaknya media sosial yang bisa digunakan menjadikan interaktif penyajian berita maupun data semakin kompleks, sehingga perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam penyajian data.⁴

Dengan demikian melihat dari perkembangan dan kemajuan TIK yang sudah

begitu amat membantu, dan terlihat kemanfaatannya memberikan dampak baik bagi siapapun yang menggunakannya, maka tidak heran jika TIK dapat merubah pola kehidupan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, melirik TIK sebagai alat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi pemilu di wilayah DIY. KPU DIY sebagai penyelenggara pemilu daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pemilu yang cepat dan informasi yang tepat. Selain itu, KPU DIY juga memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi terbaru yang bisa dinikmati oleh masyarakat.⁵

Pokok dari pemanfaatan TIK ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU dalam mengelola proses penyerahan data sampai dengan penyajiannya kepada publik dengan berbasis IT, sehingga kegiatan sebagaimana dimaksud dapat terlaksana secara cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien. Penunjangnya stabilitas lembaga dalam mensosialisasikan program kerja, maupun aktifitas seputar informasi kepada masyarakat adalah tugas yang harus dijalankan. Hal berikutnya mengapa penting untuk melihat penyampaian pesan informasi itu adalah adanya aturan dari pemerintah tentang keterbukaan informasi. Dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017. Pada pasal 3 UU pemilu disebutkan tentang prinsip dari penyelenggaraan pemilu (1) transparan dan (2) akuntabel. Kemudian pada pasal 14 huruf C disebutkan KPU berkewajiban

menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.⁶ Kewajiban tersebut juga disematkan pada KPU Provinsi (pasal 17 huruf C), dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 20 huruf C). Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan, KPU menerbitkan PKPU No. 8 tahun 2019, tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Bab I pasal 2 angka 2 huruf g, disebutkan bahwa "dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka".⁷ Maka dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai KPU dan KIP, perlunya untuk memperbarui dan menggunakan inovasi agar dapat menjalankan apa yang disebutkan dalam undang-undang, salah satunya dengan mengadopsi inovasi teknologi komunikasi, supaya mudah tersampaikan dibenak masyarakat yang sudah beralih dari konvensional menuju digital.

Saat ini KPU DIY sedang berupaya beradaptasi dengan teknologi komunikasi salah satunya diwujudkan dengan membuat konten-konten menarik dan mengedukasi yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pesan informasi kepada masyarakat. Selain upaya dalam pengelolaan media sosial KPU DIY juga mulai mengelola konten media sosial salah satunya berbentuk audio visual seperti Podcast, iklan layanan masyarakat "Zona Integritas" beserta konten-konten lainnya yang dimuat di media sosial resmi KPU DIY.

Meski demikian penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pemerintahan masih terdapat hambatan yang membuat lambatnya proses komunikasi kepada masyarakat terhambat. Hambatan tersebut antara lain kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kemudian anggaran yang kurang memadai, penerapan infrastruktur teknologi digital, perlunya literasi kepada karyawan agar dapat berkompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hambatan dan tantangan penerapan e-government di Indonesia adalah terkait isu standarisasi, sdm, infrastruktur, literasi masyarakat, kepemimpinan dan budaya organisasi.⁸ Hal ini juga ditegaskan kembali dalam penelitian.⁹ yang menyebutkan bahwa kurangnya personil profesional di bidang Teknologi, Informasi dan tidak adanya program upgrading untuk menyiapkan tenaga profesional di bidang teknologi informasi. Selain itu, permasalahan anggaran juga menjadi hambatan yang sangat mempengaruhi penerapan teknologi informasi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.

Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu seperti.¹⁰ "Pengelolaan Media Sosial Facebook Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Mensosialisasikan Informasi Pemilu 2019" hasil penelitiannya membuktikan bahwa memanfaatkan media sosial Facebook sebagai salah satu strategi membangun komunikasi kepada netizen, namun belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan dalam

pengetahuan dalam mengelola media sosial, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan sumber anggaran yang dialokasikan baik oleh pemerintah pusat melalui KPU RI maupun pemerintah daerah kota Bekasi.

Dari pemaparan akan masalah tersebut peneliti kemudian melihat pentingnya penelitian ini, ada di bagaimana instansi pemerintahan khususnya KPU DIY meningkatkan segala sesuatu yang perlu disiapkan dalam menjalankan sistem melalui media digital. Supaya implementasi yang akan diwujudkan dapat memberikan suatu pembaruan bagi sistem sebelumnya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana instansi KPU DIY menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital baru, dalam memberikan informasi seputar pemilu kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah bagaimana instansi KPU DIY menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital baru, dalam memberikan informasi seputar pemilu kepada masyarakat.

ADOPSI INOVASI

Dalam proses adopsi juga berlangsung proses penyesuaian, tetapi adaptasi itu sendiri lebih merupakan proses yang berlangsung secara alami untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Sedangkan adopsi merupakan proses penerimaan sesuatu yang baru yang ditawarkan dan diupayakan

oleh pihak lain.¹¹ Mengambil tindakan melalui proses penerimaan dengan cara menerapkan sesuatu yang disetujui oleh pihak terkait. Kemudian perubahan dan penyesuaian terhadap kondisi dan lingkungan, akan timbul sebagai suatu proses adaptasi.

Dengan adanya teknologi yang canggih telah memudahkan inovasi-inovasi baru untuk lahir menggantikan cara lama yang kurang efektif dan efisien. Inovasi-inovasi baru itu pun dituntut untuk dapat mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan yang terus bergerak maju. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.¹²

Keputusan adopsi inovasi menurut Rogers adalah proses dimana individu atau unit pengadopsi menempuh tahapan-tahapan sejak mengetahui pertama sekali inovasi diperkenalkan, diikuti implementasi ide-ide

baru dan pemastian keputusan menerima atau menolak inovasi. Di sisi lain, individu atau kelompok tidak begitu saja akan menerima ide-ide baru yang masih asing bagi mereka sehingga dibutuhkan suatu proses keputusan untuk mengadopsi inovasi.¹³

Selanjutnya Slamet (1978 dalam Adianto, 2018) memaparkan proses adopsi adalah proses yang terjadi sejak pertama sekali seseorang tersebut mengadopsi (menerima, menerapkan, menggunakan hal baru tersebut). Penerimaan atau penolakan suatu inovasi ialah keputusan yang dibuat oleh seseorang. Untuk mengadopsi suatu inovasi memerlukan jangka waktu tertentu, dari mulai seseorang mengetahui sesuatu yang baru hingga terjadi adopsi.

Adopsi inovasi Rogers (1983) terdiri dari lima tahap meliputi pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi.¹⁴ Peneliti menyertakan tabel untuk menjelaskan uraian Rogers (1983) mengenai 5 konsep yaitu *Knowledge*, *Persuasion*, *Decision*, *Implementation*, *Confirmation*.

Table 1: 5 Konsep Adopsi Inovasi Roger (1983)

Konsep	Uraian konsep
<i>Knowledge</i>	Terjadi ketika seorang individu (atau unit pengambilan keputusan lainnya) dihadapkan pada keberadaan suatu inovasi dan memperoleh pemahaman tentang cara kerja.
<i>Persuasion</i>	Terjadi ketika seorang individu (atau unit pengambilan keputusan lainnya) membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap inovasi.

<i>Decision</i>	Terjadi ketika seorang individu (atau pengambilan keputusan lainnya) terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi
<i>Implementation</i>	Terjadi ketika seorang individu (atau pengambilan keputusan lainnya) menggunakan inovasi
<i>Confirmation</i>	Terjadi ketika seorang individu (atau beberapa unit pengambilan keputusan lainnya) mencari penguatan dari keputusan inovasi yang telah dibuat, atau membalikkan keputusan sebelumnya untuk mengadopsi atau menolak inovasi jika dihadapkan pada pesan yang bertentangan tentang inovasi tersebut.

sumber: Diffusion of Innovations. London: The Free Press.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus yaitu mencari atau menjelajahi masalah dari satu kasus untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan mendalam.¹⁵ Rahardjo, 2017 mengatakan, suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Penelitian ini berusaha mencari bukti yang empirik dari objek penelitian, bagaimana melihat adopsi inovasi teknologi komunikasi yang diterapkan di KPU DIY dalam menjalankan aktivitas penyampaian pesan kepada masyarakat seputar informasi pemilihan umum.

Subjek pada penelitian ini adalah instansi pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU

DIY). KPU Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan lembaga penyelenggara pemilu ditingkat provinsi yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pengambilan data dilakukan peneliti dengan cara wawancara mendalam dengan 3 informan yaitu staff dan pejabat KPU DIY terdiri dari dua laki-laki sebagai (Informan 1, Informan 2) dan satu perempuan sebagai (Informan 3). Ketiga informan tersebut yaitu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Sekretaris KPU DIY, dan Staff Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian ini, yang pertama melakukan wawancara mendalam kepada informan. Kemudian peneliti melakukan observasi di instansi KPU DIY lalu peneliti juga melakukan berbagai kegiatan, mulai dari mengamati media sosial resmi KPU DIY dan membantu menjalankan

tugas sehari-harinya. Tujuan dari laporan observasi antara lain agar bisa melihat fenomena dan masalah yang terjadi di instansi tersebut, oleh karena itu peneliti menganggap observasi perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari tiga informan kemudian dikumpulkan dan setelah dilakukan reduksi data. Reduksi data merupakan pemilihan data yang relevan dengan masalah penelitian dan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Setelah data dipilih kemudian disederhanakan data yang tidak diperlukan oleh peneliti agar nantinya akan memberikan kemudahan dalam penampilan, penyajian serta kesimpulan sementara. Dalam proses analisis data, ketiga tahapan di atas yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah penyajian data selesai, kemudian penarikan kesimpulan dilakukan sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara yang menganut sistem demokrasi perlu kesiapan untuk membangun nilai-nilai keselarasan warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan, baik dari kesadaran akan calon pemimpin nanti yang akan terpilih, maupun masyarakat dimana perannya sebagai pemilih dari berbagai calon pemimpin negara yang menang dalam laga pilpres. Komisi Pemilihan

Umum hadir sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

ADOPSI INOVASI DI KPU DIY

Knowledge atau pengetahuan, dihadapkan pada keberadaan suatu inovasi dan memperoleh pemahaman tentang cara kerja. Kesadaran seseorang atau sekumpulan kelompok organisasi mengerti dan memahami informasi tentang inovasi, kesadaran akan berkembangnya wadah dalam menyampaikan pesan kepada khalayak luas, bahwa dalam memenuhi kebutuhannya media digital penggunaan lebih mendominasi dari pada penggunaan media lama atau konvensional. Untuk itu aktivitas yang ditemui dan ditangkap oleh indra manusia diproses melalui akal, otak secara otomatis akan menyimpan apa yang diperoleh sebagai pengetahuan. Staff dan pejabat di instansi KPU DIY juga dilihat apakah mampu memahami dan sadar akan pengetahuan mengenai perkembangan teknologi komunikasi terutama di bidang media digital, dan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Peneliti memperoleh gambaran

bagaimana tiga narasumber memahami dan mengungkapkan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi melalui media digital. Dari konsep *knowledge* ketiga informan saling memahami apa yang menjadi kebutuhan besar masyarakat dalam mendapatkan informasi baik informasi mengenai pemilu maupun informasi lainnya. Menyadari bahwa masyarakat Indonesia lebih familiar dengan teknologi informasi di media sosial, kecenderungan ini yang ditangkap KPU DIY untuk mengembangkan platform media digital. Kemudian pergeseran informasi media digital ini sehubungan dengan percepatan informasinya sampai di benak masyarakat, untuk itu sifat penyajian informasinya dibungkus dengan semenarik mungkin.

"Kita membaca trend yang berkembang di masyarakat, dalam mungkin 5 tahun terakhir ini hasil riset dari lembaga penelitian dari sosial media kemudian dari APJII (Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia) bahwa trend masyarakat itu sekarang semakin digital penetration internet ya, masyarakat itu sudah mencapai 60% lebih dari penduduk Indonesia bahkan terakhir mencapai 70% dari penduduk Indonesia jadi sebagian besar masyarakat Indonesia itu sudah familiar dengan teknologi informasi setidaknya di media sosial dan internet. nah kecenderungan ini yang kemudian ditangkap oleh KPU DIY untuk mengembangkan strategi yang semula hanya bertumpu pada strategi bertemu langsung tatap muka, kita

kembangkan juga pada strategi komunikasi digital." (wawancara dengan SQ, 17 Februari 2022)

Dari temuan tersebut menyatakan bahwa ketiga informan memahami akan pengetahuan bagaimana mengembangkan teknologi media digital untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemudian menyadari berdasarkan pertumbuhan masyarakat dalam bersosial sudah lebih dominan ke media digital dari pada media-media konvensional.

Konsep yang kedua pada adopsi inovasi ini ialah *Persuasion*, tahap bujukan ini terjadi saat terbentuknya sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap inovasi. Tahap ini memberikan gambaran kepada Individu atau kelompok organisasi tertarik pada inovasi tersebut dan secara tidak langsung aktif mencari informasi detail terkait inovasi yang akan diterapkan. Menguntungkan atau tidaknya suatu bentuk inovasi yang diterapkan, jika kesiapan dan kelengkapan untuk menjalankan inovasi tersebut telah matang, tentunya inovasi tersebut akan membawakan dampak baik bagi perusahaan maupun instansi pemerintah. Maka untuk itu KPU DIY terus menggali informasi mengenai inovasi-inovasi media digital dan memberikan gambaran inovasinya kepada pejabat dan staff lainnya. Selanjutnya bagaimana dalam tahap ini staff dan pimpinan dapat dibujuk, dan terpengaruhi oleh inovasi yang akan diterapkan. Tentunya berdasarkan

pengetahuan yang diperoleh akan mudah dalam menyampaikan usulan atau bentuk perubahan baru. Langkah awal KPU DIY dalam tahap ini yaitu penguatan kapasitas pelatihan-pelatihan terkait dengan IT dan media sosial.

"Kita kerjasama dengan pihak yang memiliki kemampuan dalam bidangnya untuk membantu kita, SDM kita bisa lebih mengenal dan meningkat pemahamannya kapasitasnya dalam membuat konten dan inovasi bar. Kita melakukan penguatan kapasitas pelatihan-pelatihan terkait dengan IT media sosial."
(wawancara dengan HS, 15 Februari 2022)

Dapat disimpulkan dalam upaya mengenalkan inovasi media digital, KPU DIY memberikan fasilitas kepada seluruh SDM untuk dapat meningkatkan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media digital dalam bentuk pelatihan dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang mumpuni di bidangnya. Tanpa disadari upaya ini adalah sesuatu rayuan atau bujukan agar semakin timbul rasa ingin tahu inovasi media digital, secara tidak langsung mereka akan bisa menganalisis bagaimana jika inovasi tersebut diterapkan tentunya akan lebih membantu dan menguntungkan.

Tahap ketiga dalam adopsi inovasi adalah *Decision* atau keputusan. Tahap ini terjadi ketika individu, kelompok atau pengambilan keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi,

menimbang keuntungan atau kerugian jika inovasi tersebut diterapkan. Karena sifat dari setiap individu berbeda untuk itu pada tahap ini tidak mudah untuk memberikan gambaran nyata, Rogers mengatakan pada tahap ini tahap yang paling sulit untuk memperoleh bukti empiris. Tidak hanya di instansi KPU DIY keputusan itu ada di tangan pimpinan, semua instansi pemerintahan pimpinan adalah jabatan yang mempunyai kendali untuk sebuah persetujuan, tetapi berbagai pertimbangan dan diskusi yang matang akan menjadi lantaran sebuah sistem atau bentuk kegiatan lainnya termasuk mengadopsi inovasi disetujui oleh pimpinan dan menjadi keputusan yang baik.

"Kan kadang-kadang ya ada diskusi kadang-kadang juga langsung setuju kan juga ada, nggak bisa di jeneralisir saya kira umum yang terjadi ya, bisa langsung disetujui bisa tidak disetujui sehingga harus di diskusi. Kami bisa menerima usulan dari bagian lain ataupun bisa menolak dengan pimpinan juga ada seperti itu tetapi sifatnya kan kalau dari pimpinan misalkan pimpinan sudah memerintahkan "a" ya harus dilakukan "a" misalkan dari hasil diskusi itu mentok ya tetap saja yang dipakai pendapat pimpinan."
(wawancara dengan FT, 15 Februari 2022)

Dan HS mengatakan bahwa sering kalinya mendiskusikan kepada seluruh komisioner, sekretaris dan staff untuk mendiskusikan usulan agar paham betul jika nanti dilakukan atau diterapkan dan dirasa

pimpinan sangat menyetujui itu karena hal demikian adalah bentuk komunikasi dalam satu struktur keorganisasian.

"Jadi pimpinan dalam hal ini komisioner dan sekretaris mengumpulkan staff untuk mengenalkan inovasi tersebut kepada mereka, tujuannya apa manfaatnya apa dasarnya apa, sehingga mereka paham betul apa yang mereka lakukan dan berkaitan dengan resiko-resiko juga kita sampaikan, supaya ketika membuat atau menyampaikan informasi tersebut tidak menimbulkan suatu masalah." (wawancara dengan HS, 15 Februari 2022)

Selama proses yang dilakukan KPU DIY dalam melihat inovasi yang akan di terapkan, tentu tidak mudah perlu waktu dan penyesuaian dari berbagai mekanisme. Kemudian usulan, diskusi, hingga pengajuan konsep, sampai ke pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Dapat disimpulkan akhir dari persetujuan yang ada di KPU DIY dalam memutuskan suatu inovasi ada di pimpinan. jika pimpinan sudah menyetujui konsep untuk inovasi, maka tahap implementasi dari inovasi tersebut dilaksanakan.

Konsep ke empat dari adopsi inovasi yaitu *Implementation*. Penerapan pada pengertian ini, ketika seorang individu atau kelompok organisasi (atau pengambilan keputusan lainnya) menggunakan inovasi. Digunakan untuk tingkat kebutuhan dan situasi yang bervariasi, menentukan kegunaan

inovasi tersebut untuk memberikan perubahan baru yang bisa menunjang kestabilan dan keuntungan bagi organisasi maupun instansi. Seperti KPU DIY digunakan untuk memperbarui sistem teknologi media digital demi tersampainya informasi kepada masyarakat dengan efisien, hingga lebih bertransformasi untuk beralih ke digital dari pada sekedar menggunakan media konvensional. KPU DIY bermain di media sosial sebagai jalan yang paling efektif untuk disajikan kepada masyarakat, KPU DIY aktif dalam menyampaikan informasinya di situs web maupun media sosialnya. Seperti yang di katakan informan SQ bahwa dengan menggunakan media baru ini tidak membutuhkan mobilitas yang tinggi, sehingga bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan pimpinan dengan sosialisasi berbasis digital. Tetapi perlu diingat bahwa, semuanya sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan disampaikan.

"Kerja-kerja teknologi informasi ini lebih simpel sebenarnya, artinya kita tidak perlu turun ke daerah-daerah tidak perlu turun menjangkau banyak orang ya menggelar acara event menghadirkan banyak orang, tetapi cukup dengan membuat konten dan bermain di media sosial penerima manfaat itu akan lebih banyak. Sehingga ini juga lebih efektif, lebih efisien, tidak membutuhkan mobilitas yang tinggi. Malah sangat antusias mereka mau terus belajar soal ini sehingga bisa melaksanakan kebijakan kebijakan pimpinan terkait dengan sosialisasi

berbasis teknologi informasi." (wawancara dengan SQ, 17 Februari 2022)

Dalam hal ini bentuk dari metode sosialisasi penyampaian pesan yang diterapkan, KPU DIY aktif untuk memanfaatkan media sosial dan situs web resmi KPU DIY, antara lain Website resmi, Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter.

"Ya kita mengembangkan teknologi informasi terutama di media sosial kita kembangkan akun-akun platform media sosial resmi official mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, Tweeter, untuk sarana komunikasi dan penyampaian informasi dan sosialisasi kita kepada masyarakat. Harapannya dengan ini akan lebih mudah karena orang sekarang lebih susah ditemui tetapi semua pegang HP sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan itu langsung lewat media sosial itu langsung masuk ke genggaman masyarakat." (wawancara dengan SQ, 17 Februari 2022)

Kemudian platform media sosial ini sebagai wadah dalam membuat konten-konten berita maupun audio visual, sebagai suatu inovasi media baru dimana masyarakat lebih menjangkau dan familiar.

"Dalam konten-konten berita konten kegiatan KPU atau berita sosialisasi dan sebagainya termasuk melalui video youtube di medsos di web." (wawancara dengan HS, 15 Februari 2022)

Pelayanan yang bisa dilakukan melalui web resmi maupun akun resmi media sosial KPU DIY, dengan demikian masyarakat bisa secara mudah menanyakan perihal pemilu, sebagai contoh masyarakat bertanya KPU menjawab begitu juga sebaliknya dilakukan secara mudah dengan langsung berkomunikasi melalui saluran digital.

"Kita mengemasnya macam-macam ya dalam bentuk interaktif seperti di instagram apa ada pertanyaan dari masyarakat kemudian KPU menjawab kemudian KPU bertanya masyarakat menjawab, karena masyarakat misalkan bertanya kapan waktunya menyoblos, apa gunanya memilih gitu kan nah itu disampaikan ke KPU, KPU menjawab dikemas dalam bentuk konten di instagram, media sosial, kemudian ada juga dalam bentuk podcast yang kita siarkan di youtube tentang disabilitas tentang partai politik. Kemudian ada juga dalam bentuk videografi yang tersebar di media sosial fotografi, meme, quote-quote, dan sebagainya jadi bentuknya macam-macam yang itu apa menyesuaikan dengan trend kebutuhan di masyarakat juga." (wawancara dengan SQ, 17 Februari 2022)

Dapat disimpulkan bahwa KPU DIY dalam mengadopsi inovasi media digital KPU DIY bergeser aktif menggunakan media digital yaitu website dan media sosial dengan konten-konten yang disajikan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar pemilu, terutama di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya apa keuntungan dan manfaat dari perubahan ini, tentu dari sudut pandang KPU DIY lebih mudah, lebih efektif dalam proses bersosialisasi kepada masyarakat luas, menjadi contoh dalam membangun komitmen baik, menjadi pelayan masyarakat dalam memberikan informasi seputar pemilu secara digital. Kemudian masyarakat akan merasakan kemudahan dalam mencari informasi mengenai pemilu maupun partai politik, karena dengan mengunjungi website dan media sosial resmi KPU DIY sudah tersedia informasi yang dibutuhkan.

Lalu apakah dari semua rangkaian tahap mengadopsi inovasi KPU DIY telah membuat keputusan yang tepat, semakin mencari penguatan dalam menanggapi inovasi yang telah diterapkan akankah dihadapkan dengan tantangan dari inovasi tersebut. pada konsep terakhir adopsi inovasi yaitu *Confirmation*. Tahap konfirmasi ini memberikan penjelasan bahwa saat keputusan untuk menerapkan inovasi, apakah masih tetap terus menggunakan inovasi tersebut, atau malah mencari penguatan dari keputusan inovasi yang telah dibuat, atau membalikkan keputusan sebelumnya untuk mengadopsi atau menolak inovasi yang sudah di terapkan. Dengan mengimplementasikan inovasi KPU DIY merasa inovasi adalah sebuah keputusan yang tepat dan menjadi kekuatan tersendiri, karena jika kita melihat slogan KPU, instansi ini harus selalu inovatif tugasnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi bersama

dalam pemilu. Maka untuk itu ini adalah bentuk dari melaksanakan slogan KPU itu sendiri sebagai instansi yang selalu inovatif, mengembangkan semua sistem menjadi digital

"Ohya jelas inovasi itu menjadi nyawa bagi KPU, menjadi ruh, bahkan slogan KPU itu harus selalu inovatif karena apa KPU itu kan tugasnya mengajak masyarakat untuk partisipasi dalam pemilu. Masyarakat itu selalu dinamis masyarakat itu selalu berubah berubah ke arah yang lebih maju, kalau KPU tidak mau inovatif dalam berkomunikasi mengajak masyarakat tentu KPU akan ditinggalkan oleh masyarakat, KPU merasa inovasi harus selalu ada cara mengajak, cara berkomunikasi, cara bersosialisasi itu harus selalu inovatif menyesuaikan pada perkembangan zaman." (wawancara dengan SQ, 17 Februari 2022)

Program yang sudah dijalankan pasti akan selalu dianalisis kemudian dilakukan pembenahan dari kekurangan dan kendala yang terjadi. Pada tahap ini, biasanya yang lebih kritis dalam mencari pengembangan baru yaitu para staff yang ada di instansi tersebut berbagai usulan dan solusi untuk lebih membenahi problem dalam berjalanya inovasi.

"Ya usulan usulan pembaruan itu selalu ada bahkan lebih banyak muncul dari staff, dan didukung oleh pihak terkait yang termasuk menjadi jalan dan membantu kita

dalam menerapkan inovasi ini." (wawancara dengan HS, 15 Februari 2022)

Pada elemen ini peneliti menarik kesimpulan bahwa setiap staff terbuka lebar untuk memberikan aspirasinya demi meningkatkannya efektifitas inovasi sebagai jembatan untuk masyarakat dalam mendapatkan informasi. Keputusan yang tepat bagi KPU DIY untuk selalu berinovasi, karena inovasi adalah sebuah kekuatan untuk bisa bersaing di dunia digital sekaligus inovasi adalah pegangan yang penting agar dapat bersosialisasi kepada masyarakat yang serba digital.

HAMBATAN ADOPTSI INOVASI DI KPU DIY

Pada proses penelitian dengan cara observasi dan wawancara mendalam pada 3 informan yang ada di KPU DIY, peneliti menemukan beberapa hambatan-hambatan yang sejalan dengan penerapan inovasi di instansi KPU DIY. Secara general hambatan ada pada SDM, anggaran, sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai, dan infrastruktur teknologi digital.

1. *Sumber Daya Manusia.* maksudnya perihal pembuatan konten-konten pada media digital. Dalam hal ini secara umum baik di KPU DIY maupun di kabupaten, kota SDM yang menguasai tentang pembuatan konten audio visual, desain grafis, editing video dan segala

macam itu terbatas sehingga perlu peningkatan hal tersebut, bahkan banyak posisi staff KPU DIY yang merangkap tugasnya.

2. *Anggaran.* Dalam membuat konten-konten media digital perlunya anggaran, struktur penganggaran KPU DIY itu karena sentralistik dari KPU RI dan nomenklatur soal pengembangan media sosial secara lebih jauh hanya sederhana sehingga usulan-usulan pembaruan itu ada yang bisa terlaksana ada yang tidak bisa terlaksana.
3. *Sarana dan Prasarana.* Dengan anggaran yang telah di ketahui pastinya sangat berpengaruh bagi sarana prasarana yang dimiliki, KPU DIY menyadari sarana prasarana belum sepenuhnya memadai misalnya alat-alat soal podcast, alat-alat vidiografi, kamera, recording kemudian yang lebih mencakup semuanya yaitu studio dan lain sebagainya.
4. *Infrastruktur Teknologi Digital.* Infrastruktur yang dimaksud adalah ketersediaan perangkat utama atau perangkat keras yang ada di KPU DIY. Dalam lingkup perangkat keras ini berupa komputer server, kemudian perangkat jaringan yang penting dalam mengakses jaringan koneksi sehingga dapat meningkatkan pelayanan maupun produksi konten media digital. Sebetulnya hal demikian sudah tersedia di KPU DIY hanya saja tingkat

presentasinya perlu untuk ditingkatkan. Jika bertahan menggunakan infrastruktur yang ada, maka dampaknya akan ke inovasi yang di terapkan.

PEMBAHASAN

Teknologi di zaman sekarang menjadi faktor yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena, hampir seluruh bidang profesi menggunakan teknologi dalam menjalankan pekerjaannya.¹⁶ Oleh karena itu peneliti menguraikan hasil dari penelitian di atas, bahwa pada lima konsep *Rogers (1983)* yaitu *Knowledge, Persuasion, Decision, Implementation, Confirmation*. Dapat disimpulkan pada konsep yang pertama *Knowledge* pengadopsi (adapter) menyadari akan kebutuhan masyarakat dalam mengelola informasi disetiap harinya. kesadaran akan bagaimana mengembangkan teknologi digital, berdasarkan pertumbuhan masyarakat dalam berinteraksi sudah lebih beralih ke media-media atau dunia serba digital. media sosial adalah suatu sarana bagi penggunaanya untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi baik itu melalui teks, gambar, audio, maupun video.¹⁷ Pada tahap ini pengetahuan sangat penting bagi calon adopsi agar pondasi dalam membangun atau menjalankan inovasi tidak asal dijalankan, tetapi ada dasar yang menjadi pegangan kuat bagi sekelompok atau individu dalam mengambil keputusan.

Dalam tahap *Persuasion*, bagaimana lingkup pengambil keputusan dapat mengadopsi inovasi agar dapat membujuk dengan bentuk gambaran inovasi yang sudah di rancang konsepnya. Awal dari bujukan ini KPU DIY memberikan pelatihan kemudian bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang mumpuni di bidangnya. Kemudian membuat contoh konsep dari inovasi yang akan dilaksanakan, dengan begitu rasa ingin tahu lebih jauh dalam hal inovasi akan semakin kuat. Di tahap ini individu akan mencari lebih jauh tentang inovasi tersebut dan keuntungan mengadopsi inovasi tersebut.¹⁸ Awal dari memulai perubahan bagi instansi terkait, KPU DIY menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan pada perubahan tersebut, agar keuntungan bisa di dapatkan.

Selanjutnya *Decision* atau keputusan. Hal yang sulit dalam memutuskan suatu perkara, untuk itu dalam hal keputusan perlunya banyak pertimbangan dari berbagai aspek kepentingan agar keputusan yang di ambil tidak membuat kerugian bagi suatu kelompok ataupun individu pengambil keputusan dalam perihal adopsi inovasi. Pelaku adopsi harus bisa membuka lebar pendapat, saran, masukan dari setiap bagian dalam struktur keorganisasian. Hasil temuan menggambarkan bahwa di instansi KPU DIY dalam proses pengambilan keputusan pimpinan sebagai otoritas paling tinggi artinya dalam memutuskan suatu hal hanya pimpinan yang bisa memutuskan terlaksana atau tidaknya inovasi tersebut. Seringnya diskusi

dan masukan dari berbagai staff dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi yang utuh dengan begitu, proses keputusan akan saling di setuju, walaupun jika pimpinan sudah menyetujui ataupun tidak, hasil akhirnya hanya pada pimpinan.

Konsep ke empat dari adopsi inovasi yaitu *Implementation*. Penerapan inovasi dilakukan jika semua tahapan sudah dilewati, dari mulai gambaran dari konsep inovasi tersebut, sampai dengan persetujuan. Untuk itu tahap ini sebagai tahap awal dimulai dari inovasi itu diterapkan. Dari uraian hasil penelitian, bahwa KPU DIY dalam mengadopsi inovasi teknologi komunikasi bergeser aktif menggunakan media digital yaitu website dan media sosial dengan konten-konten yang disajikan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar pemilu terutama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya dengan menggunakan media digital, akan lebih tersampaikan di benak masyarakat dengan sangat cepat dan efisien. Pemanfaatan media sosialisasi digital yang lebih optimal agar mempermudah tercapainya efektifitas proses sosialisasi yakni mengenalkan, mengkampanyekan melalui interaksi untuk memperoleh identitas, mengembangkan nilai-nilai yang terkandung.

Pada konsep terakhir adopsi inovasi yaitu *Confirmation*. ketiga informan mengatakan bahwa di tahap konfirmasi ini, seluruh staff di bagian manapun berhak untuk aspirasinya, saran dan kritikan dari

implementasi inovasi yang telah di jalankan selalu memperbarui hal-hal yang berkaitan dengan inovasi tersebut, supaya dalam menjalankan inovasi tersebut tidak berhenti dan terus berkelanjutan memberikan inovasi-inovasi baru melalui media komunikasi digital. Wujud optimalisasi kinerja aparatur dinas untuk tidak hanya bekerja berdasarkan program kerja namun juga turut mengupayakan inovasi kegiatan demi memaksimalkan keberhasilan kebijakan. Akan tetapi yang perlu dioptimalkan adalah komitmen dalam menyelenggarakan program yang berbasis pemberdayaan secara berkelanjutan.¹⁹ Strategi pendorong untuk mewakili pemerintah formal dalam pembentukan di media sosial sebagai saluran tambahan, strategi tarik untuk melibatkan dan memasukkan informasi dari publik, dan strategi jejaring yang mencakup kegiatan mendorong dan menarik, tetapi juga menyisakan ruang untuk keterlibatan di luar keterlibatan aktif pemerintah.²⁰

Perilaku masyarakat atau publik yang sekarang semakin inovatif, mendorong terlaksananya adopsi inovasi dalam pemerintahan adalah pengambilan keputusan reaksioner, dapat menempatkan banyak lembaga untuk meningkatkan kebutuhan dan mencakup ruang masalah yang tidak di ketahui. KPU DIY mengamati perilaku instansi dan masyarakat terhadap perubahan kebutuhan informasi lebih menggunakan media digital sebagai saluran informasi pilihan baru untuk bisa menerima dan

menyampaikan berita dan informasi terkait perihal pemilu.

Dalam prosesnya ditemukan hambatan yang membuat jalannya pelaksanaan adopsi inovasi terhambat, hambatan itu terjadi pada sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai, dan infrastruktur teknologi digital yang ada di KPU DIY. Maka diperlukan solusi dalam membentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul seluruh staff yang ada di instansi dan pihak terkait untuk bekerja sama demi penyempurnaan di bidang teknologi komunikasi yang tentunya menguntungkan bagi instansi tersebut.

Lima konsep yang disebutkan dalam teori Rogers (1983) tentang inovasi telah memberikan peranan penting dalam memotivasi, penyemangat atau mendorong instansi pemerintahan KPU DIY untuk menggunakan media digital dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa *Knowledge, Persuasion, Decision, Implementation, Confirmation*. Sebagai proses penting atas adopsi inovasi di instansi pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

SIMPULAN

Adopsi inovasi teknologi komunikasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan

teknologi digital, dalam bidang pelayanan. Inovasi ini mewujudkan warna baru bagi aktifitas penyampaian pesan informasi seputar pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta terkait proses adopsi inovasi di KPU DIY. Pada tahap pengetahuan, penyebarluasan informasi sudah bergeser aktif dengan menggunakan media digital, serta kebutuhan masyarakat sekarang mendominasi menggunakan media digital. Tahap bujukan atau rayuan, semakin timbul dengan diberikan contoh gambaran inovasi yang akan diterapkan, kemudian upaya pelatihan dan aktifitas yang serupa. Keputusan adalah hal yang tidak mudah, apa yang menjadi keinginan pihak adopsi banyak pertimbangan dan diskusi agar keputusan yang dibuat tidak menimbulkan kesalahan. Tahap penerapan inovasi, dilaksanakan dengan aktif menggunakan media digital. Beraktifitas menggunakan media digital seperti dalam lingkup media sosial website, sebagai wadah dalam memberikan informasi seputar pemilu. Dibungkus dalam bentuk berita, foto, audio visual, podcast, artikel dan lain sebagainya, cara ini jauh akan lebih bersahabat dengan masyarakat yang serba digital ini. Tahap konfirmasi memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan dan seluruh staff untuk memberikan masukan, kritik dan sarah demi inovasi yang sudah dijalankan. Tahap ini selalu terbuka agar komitmen untuk berinovasi dalam perihal pelayanan tidak hanya semangat di awal, tetapi agar bisa terus

menerus memberikan inovasi yang baru. Berdasarkan penelitian ini, di ketahui bahwa dalam proses adopsi inovasi tidak bisa dilakukan secara signifikan, melainkan harus melalui tahap transisi yang terencana dengan matang, banyak hambatan dan problematika yang ditempuh. Perlu di pikirkan dalam segi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan infrastruktur agar dapat diperhatikan dan ditingkatkan, hal demikian adalah penunjang dan sangat berpengaruh bagi terlaksananya inovasi.

Media sosial berubah sebagai respon terhadap perubahan perilaku, aktifitas dan harapan masyarakat. Keputusan dalam mengadopsi inovasi memberikan prospek besar bagi KPU DIY dalam bidang teknologi komunikasi untuk menyebarkan pesan informasi seputar pemilu kepada masyarakat. Literasi digital dalam hal ini menjadi pesan utama yang perlu diperhatikan dalam hal pemanfaatan teknologi digital.

Daftar Pustaka

1. Amar Ahmad. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Kesenjangan Informasi. *Dakwah Tabligh*. 2012;5(2):327-36.
2. Mayowan Y. Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). *Profit*. 2016;10(01):14-23.
3. Hernita S. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Melalui Penguasaan Teknologi Informasi. *J Manaj Bisnis*. 2018;5(2):57-65.
4. Setiawan A, Saputra HA, Atmojo ME. Efektifitas Penyebaran Informasi Covid-19 Melalui Media Twitter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *J Acad Praja*. 2021;4(1):89-106.
5. Wibowo A, Susanto B. Pengembangan Sistem Informasi Website KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. *J Tek Inform dan Sist Inf*. 2016;2(2):231-43.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Rencana Umum Energi Nas*. 2017;(73):1-6.
7. KEMEN-KUKM. Pengawas Koperasi. *Berita Negara*. Menteri Kesehat Republik Indones Peratur Menteri Kesehat Republik Indones. 2020;69(555):1-53.
8. Silalahi M, Napitupulu D, Patria G. Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia. *Tekno Inf dan Komun [Internet]*. 2015;1(1):10-6. Available from: <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=356188>
9. Powa AA, Kaawoan JE, Pangemanan FN. Pemanfaatan teknologi dan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian di Kabupaten Minahasa Tenggara. *J Gov*. 2021;1(2):1-12.
10. "Dila Novita" "Elvira Suryani", "Amanda Morlian", "Mita Widyastuti", "Fadhilah." Evaluasi Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sosial pada Pemilu Srentak Tahun 2019. *Eval Komun Publik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sos pada Pemilihan Umum 2019*. 2020;8(2):162-3.
11. Dera Setiawan IGB, Sri Astiti NW. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi

- Adopsi Inovasi Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 Di Subak Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. *J Manaj AGRIBISNIS (Journal Agribus Manag.* 2017;5(2):1.
12. Putra RMD. Inovasi Pelayanan Publik Di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan Inovasi E- Health Di Kota Surabaya). *Repositori.unair.ac.id.* 2018;6545:1–13.
13. Anto A. Proses Adopsi Inovasi Lokal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau. *Sosio Konsepsia.* 2018;7(2):1–30.
14. Rogers EM. *Diffusion of Innovations - Chapter 4 [Internet]. Diffusion of Innovations.* 1995. p. 160–203. Available from: <http://ocw.metu.edu.tr/file.php/118/WEEK9/rogers-doi-ch5.pdf>
15. Kusniadji S, Tarumanagara U. Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Kegiatan Pemasaran Produk Consumer Goods (Studi Kasus Pada PT Expand Berlian Mulia Di Semarang). :83–98.
16. Afda MC, Studi P, Komunikasi I, Yogyakarta UA, Grafis D. Pelatihan Desain Grafis Balai Pelatihan Kerja Kota Graphic Design Training Participant ' S Ict Literation At Pekalongan Work Training Center. X(X).
17. Warpindyastuti LD, Eka M, Sulistyawati S. Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Promosi Pada MIN 18 Jakarta. *Widya Cipta .* 2018;2(1):91–5.
18. Ramayadi H, Sariningsih N. Inovasi Program Bank Sampah Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses Komunikasi Perubahan Sosial. *SOURCE J Ilmu Komun.* 2020;6(1):46.
19. Amirudin A. Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu. *JPSI (Journal Public Sect Innov.* 2018;2(1):26.
20. Oktaviani K, Kurniati F, Soemanto A. Audit Komunikasi Program Energi Kolaborasi Kementerian ESDM Tahun 2020. *Procceeding Komunikasi dan Kehumasan Dinamika dan Strategi Humas Pemerintah di Indonesia.* 2021. 118–144 p.